China Siap Bangun 30 Tower Apartemen di Indonesia

NERACA

Jakarta - Perusahaan asal negeri tirai bambu lewat China Communications Construction Group (CCCG) bersiap untuk membangun 30 tower dalam kurun waktu 10 tahun dengan konsep superblok. Atas rencana tersebut, perusahaan yang telah membuka cabang lebih dari 120 negara tersebut akan mengalokasikan dana US$ 1 miliar. "Untuk tahap pertama kami akan bangun 8 tower dulu yang penyelesaiannya diharapkan selesai 3 tahun kedepan," ucap President of China Harbour Indonesia, Shen Chao di Jakarta, Kamis (9/6).

Selain di Jakarta, CCCG, menurut Chao, pihaknya juga akan mengembangkan bisnis properti ke kota-kota lainnya di Indonesia seperti Surabaya dan Medan. Rencana investasi tersebut tak lepas dari peran pemerintah yang menyiapkan kebijakan yang memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. CCCG melihat Indonesia sebagai sebuah tempat investasi dan bisnis yang penting selain karena usaha pemerintah Indonesia yang tak pernah henti untuk menciptakan sebuah atmosfir bisnis yang kondusif namun juga sebuah pasar yang menarik karena jumlah populasi masyarakat Indonesia yang cukup besar.

"Kami sangat nyaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dibuat oleh pemerintah khususnya mengenai proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang bersifat masif. Hal ini tentunya akan berdampak positif dan akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan," ungkapnya. PT China Harbour Indonesia merupakan anak usaha dari China Communications Construction Group (CCCG). Soal trackrecord dalam pembangunan di Indonesia, CCCG juga turut andil dalam pembangunan di Indonesia lewat proyek-proyek penting, seperti jembatan Suramadu, Terminal JICT dan lain-lain.

"Kami telah memulai sebuah Real Estate Development di Jakarta dengan nilai investasi yang cukup besar. Real Estate yang sedang kami rancang ini akan menjadi sebuah properti iconic di Jakarta. Kami juga segera akan mengembangkan bisnis properti kami ke kota-kota lainnya di Indonesia seperti Surabaya, Medan dan kota-kota lainnya. Dengan segudang pengalaman kami di dunia, kami percaya bahwa kami akan dapat membuat sebuah produk yang unik dan memenuhi bahkan melebihi ekspektasi konsumen di Indonesia," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa CCCG bangga dengan budaya teamwork yang terceminkan di semua proyek mereka sehingga dapat menjamin efisiensi biaya, pembuatan konstruksi yang berkualitas, dan penyelesaian proyek yang selalu tepat waktu. ● bari

Pemerintah Diminta Tetapkan HET Elpiji 3kg

NERACA

Jakarta - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk membuat peraturan terkait penentuan harga eceran tertinggi (HET) elpiji tiga kilogram. Menurut Wakil Ketua Komisi VII Fadel Muhammad, hal itu perlu dilakukan agar harga elpiji tiga kilogram dapat dikendalikan. "Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri dapat membuat surat keputusan bersama mengenai HET ini," ujar Fadel, seperti dilansir kantor berita Antara, kemarin.

Komisi VII menganggap, belum adanya peraturan resmi dari pemerintah tentang harga tertinggi elpiji subsidi tersebut membuat adanya perbedaan harga yang terlalu tinggi antardaerah dan tidak jarang terjadi kelangkaan. Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, selama ini HET elpiji tiga kilogram telah ditetapkan di beberapa daerah. Namun dia menyadari hal tersebut belum cukup untuk mengendalikan harga. "Perlu ada acuan yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Dwi.● bari

NERACA/Edy Wahyudi

ACC RAIH CORPORATE IMAGE 2016 : Chief Risk & Information Technology Officer Astra Credit Companies (ACC) Handoko Liem (tengah) menerima penghargaan Corporate Image Award 2016 untuk Kategori Leasing 4-Wheel yang diserahkan langsung oleh CEO Frontier Consulting Group Handi Irawan D. (kiri) disaksikan Direktur Tempo Group Bambang Harymurti (kanan) di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Rabu malam (8/6).Penghargaan Corporate Image ini merupakan ke-12 yang drtaih ACC secara berturut-turut serta pengukuhan Corporate Image 2016 ini menggunakan 4 dimensi yaitu quality, performance, responsibility dan atractiveness.

Penggunaan Kantong Plastik Berkurang Hingga 50%

Jakarta - Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang penggunaan kantong plastik menunjukkan terjadinya pengurangan rata- rata di atas 50 persen bahkan ada yang mencapai hingga 82,90 persen. "Monev kita lakukan di 27 kota hasilnya cukup memuaskan," kata Direktur Pengelolaan Sampah KLHK R Sudirman di Jakarta, seperti dikutip, kemarin.

■ NERACA

Monev (monitoring dan evaluasi)yang dilakukan hingga April lalu menunjukkan bahwa di kota Bandung berkurang hingga 48,96 persen, Jakarta Utara 61,40 persen, Palembang 60,46 persen, Pekanbaru 40 persen dan Tangerang Selatan 82,90 persen. Jumlah ritel yang dimonitoring dan mengisi kuisioner sebanyak 160 ritel baik anggota APRINDO dan maupun bukan. Sedangkan jumlah konsumen yang mengisi kuisioner adalah 535 orang.

Dari 160 ritel, 155 diantaranya sudah memahami maksud dan tujuan penerapan kantong plastik berbayar dan 141 ritel sudah memiliki prosedur operasional standar kasir tentang penerapan kebijakan tersebut. Selain itu sebanyak 136 ritel menerapkan harga Rp200 per kantong plastik sesuai dengan aturan. Ada enam kota yang menetapkan harga berbeda yaitu Balikpapan Rp1.500, Banda Aceh Rp500, Denpasar Rp200-Rp500, Kendari Rp500, Surabaya Rp200-Rp1.500 dan tertinggi Ambon Rp2.500-Rp5.000.

Sementara 91 persen konsumen memahami maksud dan tujuan penerapan kantong plastik berbayar tapi hanya sembilan persen yang menjawab setuju untuk mengikuti program pemerintah. Selanjutnya 80 persen responden menyatakan harga kantong plastik yang diterapkan terlalu murah sehingga banyak konsumen yang masih mau membeli kantong plastik. Sementara 20 persen menganggap harga yang diterapkan mahal karena merasa kantong plastik adalah hak konsumen dan selama ini gratis.

Pemerintah melaksanakan uji coba penerapan kantong plastik berbayar sejak 21 Februari 2016 di 27 kota yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Bogor, Depok, Jayapura, Kendari, Makassar. Kemudian, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Yogyakarta, Surakarta, dan Denpasar. Namun begitu, sebagian toko ritel modern kembali menggratiskan kantong plastik. Untuk itu, per 1 Juni 2016 ritel modern anggota Aprindo kembali memberikan kantong plastik gratis yang ramah lingkungan (oxydegradable) kepada konsumen atau tidak sama sekali memberikan kantong plastik lagi kepada konsumen karena tidak ada regulasi yang memayungi program kantong plastik tidak gratis."Jadi memang karena payung hukumnya tidak ada lagi, maka sebagian ritel menghentikan," ujarnya.● bari

Pemerintah Resmi Ajukan Revisi UU Ketantuan Perpajakan

NERACA

Jakarta - Pemerintah resmi mengajukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk dibahas bersama Komisi XI DPR RI sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan nasional. "Penyusunan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah didahului dengan pengajuan RUU tentang Pengampunan Pajak," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU KUP di Jakarta, Rabu (8/6).

Bambang mengatakan pengajuan RUU ini diperlukan untuk mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat serta mewujudkan sasaran pembangunan sektor keuangan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah seperti penguatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan perpajakan serta ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak terutama pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu, kata Bambang, juga diperlukan peningkatan akses kepada data pihak ketiga terutama perbankan dan peningkatan dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak.

Dengan demikian, RUU KUP ini disusun dengan mengacu pada beberapa kebijakan pokok seperti perubahan terminologi Wajib Pajak, peningkatan pelayanan perpajakan, perbaikan sistem pengenaan sanksi, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan serta penguatan pengelola administrasi perpajakan.

"Dalam RUU ini terminologi Wajib Pajak diubah menjadi Pembayar Pajak dengan maksud memberikan penghargaan dan kebanggaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam membayar pajak. Masyarakat juga diharapkan lebih patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya," ujar Bambang.

Ia menyampaikan revisi UU Nomor 16 Tahun 2009 ini juga mencantumkan perbaikan sistem pengenaan sanksi perpajakan dengan lebih mendidik dan berkeadilan. "Hal tersebut diwujudkan dengan pengenaan sanksi yang lebih rendah terhadap pembayar pajak yang secara sukarela mengungkapkan ketidakpatuhan pembayaran pajaknya, dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan terhadap pembayar pajak sebagai akibat penetapan oleh otoritas perpajakan," jelas Bambang.

Bambang mengatakan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum membutuhkan pembentukan basis data perpajakan yang kuat serta berasal dari data pihak ketiga, dengan meniadakan kerahasiaan dat as sebagaimana diatur dalam peraturan. ● bari

Enam Ruas Tol Tambahan Siap Digunakan Pemudik

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan, sedikitnya enam ruas jalan tol tambahan dapat digunakan pemudik tahun ini baik secara operasional maupun hanya fungsional untuk angkutan Lebaran 2016.

"Kita cek jalan nasional untuk arus mudik tahun ini, memang di Pulau Jawa ini yang cukup dominan itu ada jalan tol. Kita ada beberapa tambahan untuk tahun ini, khususnya Pejagan-Brebes Timur yang tahun lalu hanya dibuka sementara untuk mudik namun tahun ini akan beroperasi," kata Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis H Sumadilaga menjawab pers di Jakarta, Kamis (9/6).

Pejagan-Brebes Timur yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki panjang 26 kilometer, kata Danis, pada mudik tahun lalu ruas tersebut dibuka sementara dengan kondisi jalan masih berupa kerikil dan belum beraspal dan saat ini ruas tol tersebut sudah rampung dan menunggu diresmikan.

Selain Pejagan-Brebes Timur, Danis menyebutkan ruas Surabaya-Mojokerto sepanjang 18 kilometer dan Kertosono-Mojokerto (Mojokerto Barat-Mojokerto Utara sepanjang 5 kilometer) juga akan dioperasikan. "Di Jatim (Jawa Timur), Kertosono ke arah Mojokerto akan kita satukan sekitar 23 kilometer, akan membantu lantas (lalu lintas) yang di Jatim ini terutama dari Mojokerto ke Jombang," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, untuk membantu kelancaran lalu lintas, walaupun belum sempurna akan difungsikan beberapa jalan tol diantaranya Jalan Tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Solo-Kertosono sepanjang 10 kilometer dan juga Gempol-Pasuruan (Rembang) sepanjang 13 kilometer. Iamenyebutkan, Kementerian PUPR saat ini tengah melaksanakan integrasi sistem pembayaran tol, baik tunai maupun non-tunai, pada ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan.

Pemerintah telah menargetkan bahwa integrasi tersebut harus sudah terselenggara mulai 13 Juni 2016, agar arus mudik Lebaran 2016 bisa lebih lancar. Sebelumnya Kementerian PUPR telah melaksanakan Survei Terpadu Jalur Lebaran 2016 bersama Korlantas Polri dan Ditjen Hubdar Kemenhub tentang persiapan infrasruktur jalan dan jembatan ke Jalur Pantura, Pantai Selatan Jawa dan Jalinsum pada Februari dan Maret 2016.

Menteri PUPR pun telah memeriksa kondisi jalan di Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 10 April 2016 dan target penyelesaian pekerjaan Juni 2016 (sebelum lebaran) sudah selesai. Selanjutnya, pada H-30 sampai dengan H+10 Idul Fitri 2016 pekerjaan utama di badan jalan akan dihentikan dengan kondisi fungsional dan akan diteruskan kembali setelah hari raya. Pekerjaan yang mengganggu arus lalu lintas pada beberapa ruas tetap akan berjalan sampai H-10.● bari

Kemenkop Gandeng Bank Dunia Susun Action Plan Pengawasan Koperasi

NERACA

Jakarta - ?Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan bahwa pihaknya menggandeng Bank Dunia untuk menyusun 'action plan' terhadap sistem pengawasan seluruh koperasi di seluruh Indonesia. "Bank Dunia sudah pernah mengkaji dan melakukan penelitian mengenai pengawasan sistem online koperasi khusus KSP dan USP. Nah, salah satu hasil rekomendasinya adalah mengenai pentingnya pengawasan. Oleh karena itu, kami bekerjasama kembali dengan Bank Dunia menyusun action plan pengawasan terhadap koperasi di Indonesia, tak hanya KSP dan USP saja", kata Meliadi saat membuka workshop sistem pengawasan KSP/USP menuju koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, di Jakarta, Kamis (9/6).

Meliadi menambahkan, action plan pengawasan itu bertujuan untuk membangun sebuah koperasi yang berkualitas. "Saat ini, kita lebih memprioritaskan kualitas koperasi, ketimbang kuantitas. Namun, bila semakin banyak jumlah koperasi yang berkualitas, itu yang kita harapkan. Saat ini, dari 150 ribuan koperasi yang aktif di seluruh Indonesia, baru ada sekitar 58 ribu koperasi yang sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)", imbuh dia.

Menurut Meliadi, terkait hal itu harus ada pengawasan koperasi secara berjenjang, sesuai aturan yang ada. "Kalau untuk pengawasan koperasi yang kecil-kecil, jelas akan dibutuhkan supervisi yang banyak. Sedangkan untuk pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang sudah besar, sistemnya sudah ada dan tinggal jalan saja", tukas dia.

Bila sistem pengawasan sudah kuat, lanjut Meliadi, maka ke depan koperasi di Indonesia akan tumbuh sebagai lembaga keuangan yang biasa diterima dan bisa dipercaya oleh masyarakat. "Ini yang penting, yaitu koperasi bisa diterima dan bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, sistem pengawasan koperasi akan terus kita perkuat", tandas Meliadi. Dalam kesempatan yang sama, Jauhari Sitorus dari Bank Dunia Jakarta berharap agar kemitraan antara Bank Dunia dengan Kemenkop UKM bisa terus berlanjut, sehingga mampu membuat koperasi (termasuk KSP/USP) di seluruh Indonesia menjadi kuat, sehat, dan tangguh. "Dua tahun lalu Bank Dunia sudah pernah melakukan kajian pengawasan seperti ini. Dan salah satu rekomendasinya adalah perlunya pengawasan KSP/USP, termasuk terkait pengawasan terhadap laporan keuangan koperasi yang akuntabel", pungkas Jauhari.● bari

PT GLOBAL TELESHOP TBK.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Global Teleshop Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Juni 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : The Akmani Hotel
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91, Jakarta Pusat.

Dengan acara tunggal Rapat adalah perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.

Berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat, yaitu :

1. Dewan Komisaris dan Direksi
   Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :
   - Dewan Komisaris
     Komisaris Utama : Guntur Siboro
     Komisaris : Karnadi Widodo
   - Direksi
     Direktur Utama : Evy Soenarjo
     Direktur : Januar Chandra
     Direktur : Octaviane N.A. Mussu
2. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Sah
   Rapat telah dihadiri para pemegang saham sejumlah 1.057.804.670 saham yang dimiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,20 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan
   Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait acara Rapat.
   Untuk acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan acara Rapat.
4. Pengambil Keputusan
   Untuk mekanisme pengambilan keputusan Rapat, dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
   Untuk acara Rapat, keputusan telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.

Berikut keputusan acara Rapat, yaitu:

1. Menerima pengunduran diri Sdr. Chan Cheong Meng selaku Komisaris Independen Perseroan dan Sdr. Danang Cahyono selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sdr Guntur Siboro sebagai Komisaris Utama, sdr Karnadi Widodo sebagai Komisaris, sdri Evy Soenarjo sebagai Direktur Utama, sdr Januar Chandra sebagai Direktur dan Sdr Rusran sebagai Direktur Independen dan mengangkat sdri. Evy Soenarjo sebagai Komisaris Utama, sdr Januar Chandra sebagai Komisaris, sdr. Temi Ellendi sebagai Komisaris Independen, sdr Djoko Hariyanto sebagai Direktur Utama, sdri. Noni Cusila sebagai Direktur, sdr. Nelson P.L. sebagai Direktur dan sdr. Hermin Hartono sebagai Direktur Independen untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

   Dewan Komisaris :
   Komisaris Utama : Evy Soenarjo
   Komisaris : Januar Chandra
   Komisaris Independen : Temi Ellendi
   Direksi :
   Direktur Utama : Djoko Hariyanto
   Direktur : Octaviane N.A. Mussu
   Direktur : Noni Cusila
   Direktur : Nelson Parulian Lengguu
   Direktur Independen : Hermin Hartono
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang.
4. Memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Karena RUPS Tahunan 2016 belum dilaksanakan maka selama diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengundurkan diri dan diberhentikan akan bertanggung jawab terhadap Laporan Tahunan 2015 Perseroan.

Jakarta, 10 Juni 2016
PT Global Teleshop Tbk
Direksi

SEKAR GROUP
PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT
PT. SEKAR LAUT Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan yang telah diadakan pada hari kamis, tanggal 9 Juni 2016 di Hotel Bumi Surabaya, City Resort, Jl.Jend. Basuki Rachmat nomor 106-128, Surabaya telah disetujui dan diputuskan hal hal sebagai berikut;

Hasil RUPS Tahunan :
1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk buku 2015;
   b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2015 (*Acquit et de charge*) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2015 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp. 4.144.443.000,- (empat miliar seratus empatpuluh empat juta empatratus empatpuluh tiga ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 6,- (enam rupiah) per lembar saham;
   b. Memberikan wewenang Direksi perseroan untuk menentukan tanggal pembagian deviden tunai para pemegang saham perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit tahun buku 2016 dan memberikan wewenang pula kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain mengenai penunjukannya.
4. a. Memberhentikan dengan hormat Tuan TJAHJONO HARYONO sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada Perseroan;
   b. Mengangkat Tuan OEI HARRY FONG JAYA sebagai komisaris perseroan sejak tanggal ditutupnya rapat ini, sehingga susunan pengurus perseroan menjadi sebagi berikut :
      Presiden Direktur : Oei Harry Sunogo
      Direktur : John Canfi Gozal
      Direktur : Welly Gunawan
      Direktur : Sung Sandiono Sungkono
      Presiden Komisaris : Loddy Gunadi
      Komisaris : Oei Harry Fong Jaya
      Komisaris Independen : Bing Hartono P.
   c. Memberi kuasa kepada Direksi perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Hasil RUPS luar biasa:
Memberikan Persetujuan kepada Direksi perseroan untuk meminjam uang di bank dengan menjaminkan sebagian besar asset milik perseroan.

Surabaya, 9 Juni 2016
Direksi Perseroan

reksa dana
PENGUMUMAN
LAPORAN PERUBAHAN LAMPIRAN II KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF BAHANA CORE PROTECTED FUND DAN PROSPEKTUS
REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA CORE PROTECTED FUND 113

Dengan ini PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi Bahana Core Protected Fund 113 bahwa kami telah melakukan perubahan Lampiran II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Bahana Core Protected Fund dan Prospektus Reksa Dana Terproteksi Bahana Core Protected Fund 113, yang mana perubahan tersebut diatas meliputi hal sebagai berikut:

Perubahan pada mekanisme Tanggal Penjualan Kembali, dimana saat ini Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan mekanisme Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap 3 (tiga) bulan sekali dimulai 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Awal Investasi hingga Tanggal Akhir Investasi, dirubah Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan mekanisme Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya hingga Tanggal Akhir Investasi.

Laporan perubahan tersebut diatas telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui oleh para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi BahanaCore Protected Fund 113.

Jakarta, 10 Juni 2016
Manajer Investasi
PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga, 21 Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190
Telphone: (021) 2505277, Faksimili: (021) 2505279

PENGUMUMAN
RENCANA AKUISISI

PT CENDRAWASIH INDAH PRATAMA ("Perseroan"), suatu Peseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengumumkan bahwa PT.PUTRA SURYA INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, akan melakukan pengambilalihan saham-saham **(Akuisisi)** milik para pemegang saham pada Perseroan,dan atas Akuisisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahaan pemegang Saham pengendali pada Perseroan.
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada kami dengan alamat Jl. Cibubur Country, Blok GL,OC nomor 19, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968. Pengumuman ini dimuat dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 10 Juni 2016
DIREKSI